



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS TAMIM
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 179893

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.770.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/69 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/100 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/86 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 359 m2/100 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 292 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000		
6. Tanah Seluas 440 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000		
7. Tanah Seluas 3187 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	46.000.000
1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	68.931.528
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.884.931.528
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.884.931.528

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.